



Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Sekolah Damai

Rini Puji Susanti



Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 2, 2023

Revised J 14, 2024

Accepted Feb, 2024

Available online August 19, 2024

Kata Kunci :

Guru PKN, Pembelajaran PKN, Sekolah Damai

Keywords:

Civics Teachers, Civics Learning, and Peaceful Schools



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2024 by Author. Published by LPPM Universitas Islam Syekh-Yusuf

ABSTRAK

Kajian ini mengkaji secara detail peran penting Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang tenteram, yang berdampak positif terhadap terbentuknya masyarakat aman dan sejahtera. Proses pembentukan karakter cinta damai pendidikan kewarganegaraan. Keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai alat terpenting dalam membangun karakter cinta damai menjadi sorotan utama studi ini. Tujuan menanamkan nilai-nilai tersebut pada generasi muda melalui pembelajaran kewarganegaraan di lingkungan sekolah. PKN berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan nilai-nilai kerjasama, toleransi, dan perdamaian dalam kehidupan siswa sehari-hari. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan observasi. Hasil dari pendidikan kewarganegaraan mempunyai potensi besar dalam mendidik generasi muda untuk menghargai pentingnya kerja sama, toleransi, dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah yang mengamalkan nilai-nilai perdamaian yang diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

This study examines in detail the important role of citizenship education in creating a peaceful school environment, which has a positive impact on the formation of a safe and prosperous society. The process of forming a peace-loving character, citizenship education. The success of citizenship education as the most important tool in building peace-loving character is the main highlight of this study. The aim is to instill these values in the younger generation through civics learning in the school environment. Civics serves as a forum for conveying the values of cooperation, tolerance and peace in students' daily lives. The research used is a qualitative approach using library research. Data was collected through documentation and observation studies. The results of citizenship education have great potential in educating the younger generation to appreciate the importance of cooperation, tolerance and peace in everyday life. Schools that practice the values of peace taught through citizenship education are expected to make a positive contribution to the welfare of society.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pendidikan nasional disinergi dan linearitas diarahkan membangun, memelihara, mengembangkan karakter dan wawasan kebangsaan, persatuan nasional, solidaritas nasional, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pendidikan karakter ditentukan oleh tiga hal: mengetahui, perasaan moral yang moral, dan perilaku moral. Dengan tujuan untuk membangun bangsa yang kuat, kompetitif, moral, berbudi, akhlak mulia baik, toleransi, bekerjasama, semangat patriotik, berkembang dinamis, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila (Anif Istianah, dkk. 2021).

Guru PKN memiliki peran sentral dalam membentuk karakter siswa dan meningkatkan disiplin belajar sosial di kelas. Melalui pendekatan interaktif, studi kasus, dan keterlibatan siswa dalam aktivitas kewarganegaraan, guru dapat mengajarkan nilai-nilai positif, seperti tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian terhadap masyarakat. Dengan membangun koneksi antara pembelajaran dan kehidupan sehari-hari siswa, guru PKN dapat membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan tersebut. Selain itu, dengan memberikan dukungan pribadi, merancang program penguatan positif, dan melibatkan orang tua, guru PKN dapat secara efektif mendorong perubahan perilaku positif dan meningkatkan disiplin belajar sosial di lingkungan kelas dalam membekali pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Anif Istianah dan Kokom Komalasari, 2023).

*Corresponding author.

E-mail addresses: rinipujisusanti@ump.ac.id(First Author)

Pendidikan Kewarganegaraan dipelajari dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari diseluruh belahan dunia, walaupun memang memiliki beberapa istilah seperti *civic education*, *citizenship education* ataupun *democracy education* (Kaelan dan Zubaidi, 2010). Namun apapun istilah dalam Pendidikan Kewarganegaraan, tentu memiliki peranan penting yang sama yakni dalam menegakkan nilai pandangan atau pemikiran yang terdapat di dalam Pancasila. Salah satunya yaitu mengenai nilai-nilai dasar kemanusiaan dan keadilan. Tujuan mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mengajarkan peserta didik menjadi warga negara yang sesuai dengan kaidah-kaidah Pancasila seperti bertanggung jawab, santun, percaya diri dalam berkomunikasi baik di rumah maupun lingkungan sosial lainnya (Supriyanto, 2018). Oleh karena itu, berdasarkan tujuan di atas maka mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana dalam pembentukan karakter generasi penerus bangsa.

Siswa diharapkan memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling toleransi dengan setiap perbedaan, hal tersebut dapat diupayakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Suharyanto, 2013). Karena Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai kaitan dengan sebuah kerukunan, maka adanya mata pelajaran ini diharapkan peserta didik mampu memiliki kesadaran dan keinginan bertingkah laku sesuai dengan norma yang ada. Sehingga dalam ruang lingkup sekolah dapat terjalin sebuah toleransi dan terciptalah sekolah damai. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran penting dalam mewujudkan sekolah damai dan upaya berkehidupan sosial yang harmonis. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, serta memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mewujudkan sekolah damai dan upaya berkehidupan sosial yang baik.

Pemahaman Nilai-nilai Kewarganegaraan: Pendidikan Kewarganegaraan membantu siswa memahami nilai-nilai fundamental seperti demokrasi, keadilan, persamaan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan memahami nilai-nilai ini, siswa akan lebih cenderung untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut dalam interaksi sehari-hari di sekolah dan masyarakat. **Pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis:** melalui Pendidikan Kewarganegaraan, siswa diajarkan untuk berpikir kritis tentang isu-isu sosial dan politik. Ini membantu mereka memahami berbagai sudut pandang, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Kemampuan berpikir kritis juga membantu siswa memecahkan masalah dengan cara yang konstruktif.

Pengembangan kemampuan berkomunikasi dan negosiasi: Pendidikan Kewarganegaraan melibatkan berbagai aktivitas komunikasi, seperti diskusi kelompok, debat, dan presentasi. Ini membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan kemampuan untuk bernegosiasi dengan orang lain. Kemampuan ini sangat penting dalam membangun hubungan sosial yang baik dan mencegah konflik. **Pendidikan tentang konflik dan penyelesaian konflik:** PKn dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sifat konflik, penyebabnya, dan cara-cara untuk mengelolanya dengan damai. Siswa dapat mempelajari strategi penyelesaian konflik yang konstruktif, seperti dialog terbuka, mediasi, dan rekonsiliasi. **Pendidikan tentang toleransi dan keragaman:** Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan tentang pentingnya toleransi terhadap perbedaan budaya, agama, etnis, dan pandangan politik. Ini membantu siswa menghargai keragaman dan menghindari tindakan diskriminatif atau intoleran.

Pendidikan tentang partisipasi sipil: melalui PKn, siswa diajarkan tentang pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Mereka dapat belajar tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta cara-cara untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. **Mendorong kepemimpinan dan kolaborasi:** Pendidikan Kewarganegaraan dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan bekerja sama dalam kelompok. Ini penting dalam membangun hubungan yang sehat dan berkontribusi pada atmosfer sekolah yang damai. **Pengenalan terhadap isu-isu global dan lingkungan:** PKn dapat membantu siswa memahami isu-isu global, seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan perdamaian dunia. Hal ini dapat menginspirasi mereka untuk berkontribusi dalam upaya membangun dunia yang lebih baik melalui aksi-aksi positif.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini ke dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, sekolah dapat berperan penting dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran sosial, pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban, serta kemampuan untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang damai. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peranan sentral dalam menghasilkan lingkungan sekolah yang harmonis dan membentuk masyarakat yang sejahtera serta tenteram. PKn tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi juga mengembangkan pemahaman siswa

tentang tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang berkontribusi dalam menciptakan kehidupan sosial yang damai dan sejahtera. PKn membantu mengembangkan karakter siswa melalui pengajaran nilai-nilai seperti toleransi, saling menghormati, dan kerjasama. Ini menjadi dasar penting dalam membentuk hubungan yang baik antara individu dalam lingkungan sekolah, yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Melalui pendidikan ini, siswa diajarkan untuk memahami perbedaan sebagai kekayaan dan untuk menghindari konflik yang merugikan.

Selain itu, PKn juga berperan dalam membentuk pemahaman yang lebih dalam tentang pluralitas budaya dan agama. Ini membantu siswa menghargai keragaman masyarakat, mengurangi prasangka, dan mempromosikan inklusivitas. PKn juga mengajarkan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan dalam menangani isu-isu sosial, sehingga siswa dapat berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat.

Indonesia merupakan negara multikultural, yang tergambar dari semboyan negara, "Bhinneka tunggal ika" (Hariyanti Hariyanti, dkk 2023). Pentingnya resolusi konflik secara damai ditekankan dalam pembelajaran PKn. Siswa dipersiapkan untuk menghadapi tantangan konflik dengan cara yang mengedepankan dialog, negosiasi, dan solusi berbasis konsensus. Dengan demikian, PKn membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perdamaian, tidak hanya di lingkup sekolah, tetapi juga dalam interaksi sosial di masyarakat. Menurut Hadjam & Widhiarso (2003:11) sekolah damai nir kekerasan adalah sekolah yang kondusif bagi proses belajar mengajar yang memberikan jaminan suasana kenyamanan dan keamanan baik fisik maupun psikologis pada setiap komponen di sekolah karena adanya kasih sayang, perhatian, kepercayaan dan kebersamaan. Sekolah yang damai adalah sekolah yang pada beberapa aspeknya memiliki indikasi tertentu. Berikut ini akan dijelaskan tentang aspek dan indikasi sekolah damai anti kekerasan. Kebijakan pendidikan kewarganegaraan. Ini dapat mencakup analisis tentang cara pendidikan kewarganegaraan diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, strategi untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokratis, atau evaluasi terhadap program-program kewarganegaraan yang ada. Kebijakan pendidikan untuk mempromosikan kewarganegaraan dalam konteks abad ke-21.

Secara teoritis, topik ini mungkin membahas berbagai dimensi kewarganegaraan, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini mungkin juga mengkaji pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang holistik dan menyeluruh, termasuk bagaimana pendidikan dapat mempersiapkan warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat global yang terus berubah (Cogan, John J., 1997). Sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan penjabaran mengenai perlindungan anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan. prinsip-prinsip perlindungan anak dalam pendidikan sering mencakup hak-hak dasar anak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, terlindungi dari kekerasan fisik atau verbal, serta hak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Perlindungan anak di dalam dan di sekitar satuan pendidikan mencakup pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, pelecehan, atau diskriminasi terhadap anak. Sehubungan dengan "perdamaian dalam pendidikan," pendidikan damai adalah suatu konsep yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perdamaian. Ini melibatkan pembelajaran tentang resolusi konflik, toleransi, pemahaman antarbudaya, dan kemampuan berkomunikasi efektif. Pendidikan damai juga dapat mencakup pengembangan keterampilan sosial, empati, dan pemecahan masalah.

Keterlibatan dan Komunikasi efektif di sekolah pada hakekatnya merupakan sebuah proses hubungan yang harmonis antar warga sekolah di dalam internal sekolah maupun hubungan eksternal sekolah dengan *stakeholder* terkait (Sutapa, M., 2006:74). Pada sekolah yang damai nir kekerasan komunikasi dan hubungan yang terjadi antar warga sekolah antara lain:(1) penuh dengan kerukunan dan kekeluargaan; (2) adanya sikap saling mencintai, menghargai, menghormati, memperhatikan dan mempercayai sesama warga sekolah; (3) adanya perasaan sederajat, senasib sepenanggungan (solidaritas); (4) adanya komunikasi non formal antara pendidik dn peserta didik, misalnya peserta didik dapat mengeluarkan keluh kesahnya atau menceritakan masalah yang dihadapi; dan (5) pendidik dapat bertindak sebagai sahabat peserta didik.

Oleh karena itu, berdasarkan pendahuluan tersebut bahwa urgensi PKn dalam menanamkan kesejahteraan dalam berkehidupan sosial sangatlah mendukung dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana peran Pendidikan Kewarganegaraan sangatlah penting dalam mewujudkan sekolah yang damai dan membentuk kehidupan sosial yang tenteram serta sejahtera. Melalui pembelajaran PKn, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan damai.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif (Gunawan, I, 2013). Sarana dalam penelitian ini merupakan peneliti sendiri yang bertindak sebagai *human instrument* dengan cara memfokuskan mencari sumber teori setelah itu menganalisa teori serta data-data yang sudah diperoleh dan dirangkum dalam sebuah kesimpulan yang berdasar pada hasil teori dan data tersebut. Metode penelitian kualitatif ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati Kirkl dan Miller (Moleong 2010:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan fasebilitas masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu (Sugiyono 2014:286) Pada penelitian ini yang difokuskan pada pembahasan mengenai peran pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan sekolah damai di tengah-tengah kehidupan masyarakat pluralis.

Kemudian, sumber data, Menurut Lofland (Moleong 2018:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data pelengkap yaitu berfungsi melengkapi data yang diperlukan oleh data primer. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dan arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Maleong, 2011:159). Pada penelitian ini yang dapat digolongkan ke dalam data sekunder meliputi dokumen, jurnal atau artikel, dan foto yang sesuai dengan topik atau fokus penulisan. Buku literatur, dokumen penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Lingkungan Masyarakat Toleran dan Aman

Indonesia disebut negara kesejahteraan karena telah memasukkan penghormatan terhadap perbedaan dalam masyarakat dan membebaskan kelompok-kelompok heterogen untuk mempertahankan keunikan karakteristik dan budaya masing-masing di setiap daerahnya. Indonesia lahir bukan hanya dari satu latar belakang, melainkan berbagai macam latar belakang (Irawan and Firdaus 2021). Bagi Indonesia, membangun masyarakat demokratis di tengah masyarakat yang heterogen tentu tidak mudah. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkebutuhan sosial dan interaktif adalah pendidikan pluralistik agar setiap insan Indonesia tetap menjunjung tinggi cinta damai sehingga tidak ada perbedaan suku, budaya dan daerah. Pluralitas atau kemajemukan merupakan suatu keadaan nyata yang harus diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia yang dibangun atas dasar perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut pada suatu saat dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu diperlukan solusi atau pencegahan yaitu pendidikan multikultural agar kemajemukan atau pluralisme dapat tetap terjaga dan diterima sebagai aset atau kekayaan yang dimiliki bangsa (We'u, 2020).

Pendidikan pluralistik dapat dipahami sebagai pendidikan dengan pasifisme, tanpa banyak prasangka buruk, memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi sesuatu dan memiliki rasa kebebasan untuk belajar atau yang biasa disebut kebebasan untuk belajar dari budaya dan etnis yang beragam dalam perspektif yang beragam dan masyarakat multikultural (Parekh, 2017). Pada pembahasan tersebut, tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkebutuhan sosial dan interaktif melalui pendidikan pluralistik. Pendekatan pendidikan ini memiliki beberapa poin penting:

- 1) Pendidikan Pluralistik sebagai sarana pembentukan masyarakat berkebutuhan sosial dan interaktif: Pendidikan pluralistik bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mampu berinteraksi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang suku, budaya, dan daerah yang beragam. Ini melibatkan menghormati dan menghargai keragaman serta membangun pemahaman yang mendalam tentang perbedaan-perbedaan tersebut.
- 2) Cinta Damai sebagai Fokus Sentral: Pendidikan pluralistik menekankan pentingnya cinta damai sebagai prinsip yang fundamental dalam menghadapi perbedaan budaya dan etnis. Dengan mendorong rasa cinta damai, pendidikan ini membantu mengurangi konflik, diskriminasi, dan

pembedaan yang seringkali muncul akibat ketidakpahaman atau ketidakberanian untuk berinteraksi dengan kelompok lain.

- 3) Mengatasi Prasangka Buruk: Pendidikan pluralistik berusaha mengatasi prasangka buruk dan stereotip yang mungkin ada di kalangan masyarakat. Ini dilakukan dengan memfasilitasi interaksi langsung dan pemahaman mendalam antara kelompok yang berbeda, sehingga mengurangi kesalahpahaman dan prasangka yang tidak berdasar.
- 4) Kebebasan untuk Mengeksplorasi dan Belajar: Pendidikan pluralistik memberikan kebebasan kepada individu untuk mengeksplorasi budaya dan etnis yang beragam. Ini memungkinkan mereka belajar dari pengalaman langsung, bertukar pengetahuan, dan memperkaya pemahaman mereka tentang keragaman manusia.

Mendeklarasikan toleransi adalah proyek sosial yang penting serta keberhasilannya pada jauh lebih banyak daripada hukum, apa pun "pesan yang jelas" yang diklaim oleh pemerintah (Russell 2017). Selanjutnya Johnson dan Johnson (2006) menjelaskan bahwa pendidikan perdamaian adalah kunci untuk membangun dan memelihara perdamaian yang disepakati bersama. Menciptakan program pendidikan perdamaian yang efektif di sekolah, hal ini terutama dilakukan melalui penggunaan pembelajaran kooperatif. Adanya melibatkan lima langkah. Pertama, sistem pendidikan publik harus dibangun dengan kehadiran wajib; semua anak dan remaja harus hadir sehingga siswa dari kelompok yang sebelumnya berkonflik dapat berinteraksi dan mempunyai kesempatan untuk membangun hubungan positif satu sama lain. Kedua, rasa kebersamaan dan kesamaan nasib perlu dibangun dengan menekankan tujuan bersama, distribusi manfaat yang 'adil' dari pencapaian tujuan, dan identitas bersama. Di sekolah, hal ini terutama dilakukan melalui penggunaan pembelajaran kooperatif. Ketiga, siswa harus diajarkan prosedur kontroversi konstruktif untuk memastikan mereka tahu bagaimana membuat keputusan sulit dan terlibat dalam wacana politik. Keempat, siswa harus diajarkan bagaimana terlibat dalam negosiasi integratif dan mediasi teman sejawat untuk menyelesaikan konflik mereka satu sama lain secara konstruktif. Kelima, nilai-nilai kewarganegaraan harus ditanamkan dengan memfokuskan siswa pada kebaikan bersama dalam jangka panjang.

Pendidikan perdamaian dan rekan program pendidikan mediasi mempunyai pengaruh yang luas terhadap keterampilan resolusi konflik siswa (Turk, 2018). Sedangkan Eliasa, et.al (2019) menjelaskan bahwa pendidikan perdamaian merupakan disiplin ilmu yang luas dan memiliki definisi yang beragam. Secara umum, pendidikan perdamaian ditujukan untuk mengajarkan informasi, sikap, nilai, dan kompetensi perilaku yang diperlukan dalam menyelesaikan konflik tanpa kekerasan serta untuk membangun dan menjaga kebersamaan dan keharmonisan.

Pendidikan perdamaian bersifat komprehensif. mencakup pengajaran oleh semua anggota sekolah. Standar-standar ini, yang direkomendasikan oleh para peneliti dan praktisi dari berbagai belahan dunia, menetapkan pengajaran yang komprehensif dengan kurikulum informal dan formal. Standar sukarela ini merupakan respons terhadap kebijakan neoliberal di bidang pendidikan, standar lahir dari konsep yang bertahan lama seiring dengan mengenai praktik pendidikan dan pembangunan perdamaian (Carter, 2008).

Walker, Chan, and McEver (2021) menjelaskan cara melindungi hak asasi manusia dengan cara mempromosikan pendidikan kewarganegaraan menuju kewarganegaraan global, dan memahami apa yang menjadi kebaikan bersama bagi semua. Dalam rangka mencapai visi masyarakat Indonesia yang berkebutuhan sosial dan interaktif serta menghormati nilai cinta damai, pendidikan pluralistik memainkan peran krusial dalam membentuk generasi yang penuh pengertian, toleransi, dan keterbukaan terhadap keanekaragaman budaya dan etnis di Indonesia. Pendekatan perdamaian: perdamaian negatif dan perdamaian positif, dalam rangka mengatasi berbagai bentuk kekerasan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kedua konsep tersebut:

- 1) **Perdamaian Negatif:** Perdamaian negatif merujuk pada upaya untuk mengatasi kekerasan fisik dengan menghindari penggunaan senjata atau kekuatan militer. Dalam konteks ini, ada dua konsep yang sering digunakan: Cipta Damai (*Peace Making*): Ini mencakup usaha untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Negosiasi, mediasi, dan diplomasi adalah contoh dari cipta damai. Tujuannya adalah untuk menghentikan pertumpahan darah dan meredakan ketegangan. Jaga Damai (*Peace Keeping*): Ini melibatkan penempatan pasukan atau personel internasional untuk menjaga ketertiban dan mencegah

konflik berlanjut. Misalnya, pasukan perdamaian PBB yang ditempatkan di zona-zona konflik. Tujuannya adalah menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi kekerasan.

- 2) Perdamaian Positif:** Perdamaian positif, di sisi lain, berfokus pada upaya untuk mengatasi kekerasan non fisik, seperti kekerasan struktural dan kultural, serta mempromosikan keadilan sosial jangka panjang. Dalam konteks ini, ada konsep yang sering digunakan: Bina Damai (*Peace Building*): Ini melibatkan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, inklusif, dan adil setelah konflik berakhir. Upaya ini meliputi pembangunan ekonomi, rekonsiliasi, perbaikan lembaga-lembaga, pendidikan, dan promosi hak asasi manusia. Tujuannya adalah untuk mencegah kembali terjadinya konflik dengan mengatasi akar masalah dan memperkuat kohesi sosial.

Pada konteks ini, damai diartikan sebagai situasi di mana kekerasan fisik, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural telah diatasi. Pendekatan perdamaian positif menciptakan landasan yang lebih kokoh untuk masyarakat yang beradab dan adil, sementara perdamaian negatif fokus pada menghentikan pertumpahan darah dan konflik aktual. Penting untuk memahami bahwa kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi dalam upaya untuk mencapai perdamaian keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada praktiknya, baik perdamaian positif maupun perdamaian negatif dapat bekerja bersama untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Pendekatan ini tergantung pada konteks, sifat konflik, dan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam menciptakan lingkungan damai dan stabil. Penting untuk diingat bahwa tidak ada pendekatan yang satu ukuran cocok untuk semua situasi. Kombinasi yang tepat antara perdamaian positif dan negatif akan sangat tergantung pada dinamika konflik, kebutuhan masyarakat, dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Keduanya memiliki peran yang penting dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan dan masyarakat yang harmonis.

Berbagai upaya dilakukan oleh Indonesia untuk menertibkan masyarakat yang pluralisme dan multikultural, salah satunya adalah pemberdayaan sekolah damai. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang tidak hanya terbatas pada bangunan fisik, tetapi juga melibatkan dimensi budaya, imajinatif, dan dukungan dari berbagai pihak. Berikut adalah beberapa poin penting yang dijelaskan dalam deskripsi tersebut: Tujuan Utama Sekolah Damai: Tujuan utama sekolah damai adalah menciptakan lingkungan sekolah yang mampu menghasilkan individu-individu yang menjadi duta damai di luar lingkungan sekolah. Ini artinya sekolah tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk karakter dan sikap positif yang mendorong perdamaian. Dimensi Imajiner dan Budaya: Sekolah damai tidak hanya terbatas pada aspek fisik bangunan, tetapi juga mencakup dimensi imajiner, seperti nilai-nilai, sikap, dan budaya yang mendukung perdamaian. Ini melibatkan pembentukan suasana yang kondusif untuk dialog, kerjasama, dan pemahaman antara semua anggota komunitas sekolah.

Dukungan dari Berbagai Pihak: Menciptakan sekolah damai memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk siswa, guru, staf administrasi, dan komunitas sekitar. Ini menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pihak dalam membangun budaya damai. Peran Individu dalam Sekolah Damai: Sekolah damai mengidentifikasi peran kunci dari berbagai komponen di sekolah, termasuk peserta didik atau siswa, pendidik atau guru, dan staf kependidikan. Semua anggota sekolah diharapkan menjadi teladan dalam mempraktikkan sikap damai dan berkontribusi pada terciptanya lingkungan belajar yang harmonis. Pentingnya Teladan dan Duta Damai: Selain mengajarkan nilai-nilai damai, sekolah juga menekankan pentingnya memiliki individu yang berperan sebagai teladan dan duta damai di dalam dan di luar sekolah. Hal ini mencerminkan bagaimana konsep perdamaian tidak hanya berlaku di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam interaksi dengan masyarakat luas.

Pentingnya karakter yang baik pada peserta didik di era global sejalan dengan kebutuhan dan tantangan zaman, membekali individu untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. sebagai upaya untuk membekali peserta didik dalam mewujudkan berdimensi global dan belajar sepanjang hayat, yang akan menjadi perisai bagi daya saing Indonesia di era global, khususnya dalam pengembangan dan penguatan karakter bangsa yang sesuai dengan Pancasila (Irawan, Hermawan, and Wijayanti 2021; Irawan et al. 2023; Irawan and Masyitoh 2023).

Dengan mengimplementasikan konsep sekolah damai seperti yang dijelaskan, sekolah dapat menjadi tempat yang lebih dari sekadar tempat belajar, tetapi juga wadah untuk membentuk generasi yang memiliki pemahaman mendalam tentang perdamaian, memiliki keterampilan

berdamai, dan siap untuk berkontribusi pada menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis.

b. Peran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Menciptakan Sekolah Damai

Sekolah memiliki posisi yang unik untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar dan mempraktikkan keterampilan sosial-emosional baru dengan teman sebaya dari latar belakang yang berbeda, bekerja sama dengan orang lain, menyelesaikan konflik secara damai, mempertimbangkan perspektif orang lain, membela teman sebaya yang menjadi korban, dan mengubah cara berpikir mereka dari "Apa untungnya bagiku" menjadi "Saya ingin menjadi orang yang seperti apa" (Hymel and Darwich, 2018). Salah satu peran Pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam menciptakan sekolah damai dan membentuk karakter siswa menjadi duta perdamaian. Pembelajaran kewarganegaraan dan kesempatan aksi kewarganegaraan dalam konteks sekolah dimaksudkan untuk mendorong pengembangan warga negara demokratis yang aktif dan terinformasi, yang merupakan tujuan utama pendidikan (MCEETYA 2008) (Reichert and Print 2018).

Suyanto mengidentifikasi beberapa peran utama pendidikan kewarganegaraan dalam konteks ini: (1). Pembentukan Sikap Toleransi dan Menghargai Keragaman: Pendidikan kewarganegaraan membantu siswa memahami nilai-nilai kemanusiaan, menghargai perbedaan, dan bersikap toleran terhadap keragaman budaya, agama, dan latar belakang sosial. Ini penting untuk mencegah konflik dan membangun lingkungan sekolah yang inklusif, (2). Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis: Pendidikan kewarganegaraan mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang isu-isu sosial dan politik. Dengan kemampuan berpikir kritis, siswa dapat memahami dampak dari tindakan mereka dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam situasi yang berpotensi menimbulkan konflik. (3). Peningkatan Kemampuan Komunikasi Efektif: Siswa diajarkan bagaimana berkomunikasi dengan efektif, mendengarkan pandangan orang lain, dan mengekspresikan pendapat mereka dengan hormat. Kemampuan ini membantu mencegah salah pengertian dan memungkinkan dialog yang konstruktif dalam mengatasi perbedaan pendapat, (4). Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia dan Keadilan: Pendidikan kewarganegaraan membantu siswa memahami hak asasi manusia, prinsip keadilan, dan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua individu. Ini mendukung pembentukan sikap yang mendorong perdamaian dan keadilan, (5). Pemberdayaan untuk Aksi Positif: Melalui pendidikan kewarganegaraan, siswa diberdayakan untuk mengambil tindakan positif dalam mempromosikan perdamaian di lingkungan mereka. Mereka diajarkan bagaimana menjadi agen perubahan yang membangun hubungan yang harmonis dan memecahkan konflik secara damai. (6). Pembentukan Identitas dan Kepedulian Nasional: Pendidikan kewarganegaraan membantu siswa memahami identitas nasional mereka, sejarah, dan nilai-nilai yang mendasarinya. Hal ini dapat memupuk rasa persatuan, solidaritas, dan cinta terhadap tanah air, yang juga berperan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang damai (Zulnuraini, 2012).

Penerapan Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif, sekolah dapat menjadi tempat di mana siswa belajar untuk menghormati, bekerja sama, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Pendidikan Kewarganegaraan membantu membentuk generasi yang sadar akan pentingnya perdamaian, memiliki keterampilan sosial yang kuat, dan siap untuk berkontribusi pada menciptakan dunia yang lebih harmonis. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan saja yang berperan penting dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, tetapi juga para guru Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi, peran guru PKn mengajarkan banyak hal seperti banyak nilai, etika, norma, dan perilaku yang mencerminkan kewarganegaraan yang baik.

Guru PKn juga mengajarkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila menyukai nilai-nilai ketuhanan dan persatuan, karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memilikinya perbedaan suku, agama, ras, dan lain-lain. Jadi, harus ada toleransi atau saling menghargai lainnya. Sofian Abdulatif (2021) menjelaskan bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan diperlukan untuk memperoleh keterampilan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan keutamaan kelompok, suku, agama dan budaya tertentu. Selesai sebagai upaya untuk mencapai dan menyelenggarakan keadilan dan juga digunakan sebagai pendekatan untuk membentuk karakter peserta didik, terutama dengan mengedepankan toleransi dan saling menghargai antar sesama. Ada teori yang berkaitan dengan toleransi siswa, yaitu teori Albert Bandura. Berdasarkan teorinya, pembentukan sikap toleransi harus melalui proses dan langkah seseorang ketika menerima informasi dari lingkungan terdekatnya dia sendiri.

Toleransi tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang secara bertahap beberapa dilatarbelakangi oleh sifat primordial yang dikaruniai manusia berupa akal sehat pikiran dapat berpikir, mengingat, mengevaluasi sesuatu dan mampu membandingkan

sehingga mereka akhirnya dapat membuat keputusan yang menurut mereka terbaik. Maka dari sinilah awal mulanya terbentuknya orang-orang yang baik atau bahkan sebaliknya, dalam hal ini mengarah pada sikap toleransi untuk siswa (Sofian Abdulatif, 2021).

- 1) Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan yang Harmonis: Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan yang mempromosikan nilai-nilai harmoni, kerjasama, dan toleransi memiliki dampak positif pada lingkungan sekolah. Siswa yang terlibat dalam pendidikan kewarganegaraan yang berfokus pada pemahaman tentang hak dan tanggung jawab warga negara cenderung lebih mampu mengatasi perbedaan dan konflik dengan cara yang konstruktif.
- 2) Dampak Positif pada Kesejahteraan Siswa: Siswa yang mendapatkan Pendidikan Kewarganegaraan yang berfokus pada harmoni dan perdamaian memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Mereka merasa lebih aman, diterima, dan termotivasi untuk belajar. Ini juga berdampak pada peningkatan prestasi akademik dan pengembangan keterampilan sosial.
- 3) Pembentukan Generasi Pemimpin Damai: Pendidikan Kewarganegaraan yang menanamkan nilai-nilai harmoni membantu membentuk generasi muda yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang mampu membangun masyarakat yang damai dan inklusif. Mereka memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dengan bijaksana dan bekerja menuju tujuan bersama.
- 4) Pembentukan Mentalitas dan Sikap Positif Siswa: Melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan harmoni, sekolah membantu membentuk mentalitas siswa yang positif terhadap perbedaan dan keragaman. Mereka diajarkan untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, sehingga dapat mengurangi prasangka, diskriminasi, dan konflik antarindividu dan kelompok.
- 5) Peningkatan Keterampilan Sosial: Pendidikan Kewarganegaraan yang berorientasi pada harmoni juga memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial yang penting, seperti kemampuan berkomunikasi yang efektif, kolaborasi, pemecahan masalah, dan negosiasi. Ini akan membantu siswa berinteraksi dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam situasi yang memerlukan penyelesaian konflik.
- 6) Menciptakan Lingkungan Belajar yang Aman dan Inklusif: Sekolah yang memprioritaskan Pendidikan Kewarganegaraan yang harmonis cenderung menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi semua siswa. Siswa merasa diterima dan dihargai tanpa memandang latar belakang, agama, suku, atau status sosial. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam kegiatan akademis dan ekstrakurikuler.
- 7) Pemberdayaan Siswa untuk Mengatasi Konflik: Melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang berfokus pada kerjasama dan perdamaian, siswa diberdayakan untuk mengatasi konflik secara konstruktif. Mereka diajarkan keterampilan komunikasi yang efektif, pemahaman tentang berbagai sudut pandang, dan strategi pemecahan masalah yang bisa diterapkan dalam situasi sehari-hari.
- 8) Menghasilkan Pemimpin yang Bertanggung Jawab dan Peduli: Pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan yang harmonis membantu mengembangkan karakteristik pemimpin masa depan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap masyarakat. Siswa akan memiliki kesadaran tentang tanggung jawab mereka terhadap pembangunan masyarakat yang damai dan berkelanjutan.
- 9) Kontribusi Positif terhadap Perdamaian Masyarakat: Melalui pengajaran nilai-nilai kewarganegaraan yang mendorong harmoni, sekolah secara tidak langsung ikut berperan dalam membangun masyarakat yang lebih damai. Generasi muda yang mendapatkan Pendidikan Kewarganegaraan yang baik akan membawa pemahaman dan komitmen terhadap perdamaian dalam lingkungan mereka, sehingga berpotensi mengurangi tingkat konflik sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembahasannya adalah integrasi Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk menciptakan harmoni dalam pendidikan kewarganegaraan, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam seluruh kurikulum sekolah. Ini bisa dilakukan dengan menyelaraskan materi kewarganegaraan dengan mata pelajaran lain, seperti sejarah, bahasa, dan seni, untuk memperlihatkan bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan.

- 1) Metode Pembelajaran Berbasis Partisipasi: Pembelajaran kewarganegaraan yang aktif dan berbasis partisipasi membantu siswa memahami dan mengalami nilai-nilai harmoni secara langsung. Diskusi, proyek kolaboratif, simulasi, dan kunjungan lapangan dapat membantu siswa melihat pentingnya kerjasama dan toleransi dalam situasi nyata.
- 2) Pelatihan Guru dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai dalam mengajar Pendidikan Kewarganegaraan yang berfokus pada harmoni. Mereka harus memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kewarganegaraan dan keterampilan untuk membimbing siswa dalam menghadapi perbedaan pendapat dan konflik.
- 3) Kemitraan dengan Komunitas: Melibatkan komunitas dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat memperluas dampaknya. Kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat, organisasi nirlaba, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat membantu memperkuat pesan harmoni dan perdamaian dalam lingkungan sekolah dan masyarakat lebih luas.

Dengan menjalankan Pendidikan Kewarganegaraan yang berfokus pada harmoni, sekolah dapat menjadi pusat yang mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan generasi yang sadar akan pentingnya kerjasama, toleransi, dan perdamaian dalam mencapai masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, begitu sangat penting PKn dalam konstruk membangun kehidupan dan kesejahteraan sosial warga negara.

4. KESIMPULAN

Nilai-nilai kewarganegaraan diintegrasikan secara mendalam dan mempromosikan pemahaman yang baik tentang tanggung jawab sebagai warga negara, pendidikan dapat membentuk generasi muda yang sadar akan pentingnya kerjasama, toleransi, dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah yang menerapkan pendekatan ini dapat menjadi tempat di mana perbedaan dihormati, konflik diselesaikan dengan cara yang konstruktif, dan kesejahteraan sosial ditingkatkan melalui partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat yang harmonis. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran krusial dalam membentuk sekolah damai yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sosial. Melalui pendidikan ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang aspek hukum dan struktur pemerintahan, tetapi juga mengembangkan sikap, nilai, dan keterampilan yang mendukung perdamaian dan harmoni.

5. REFERENSI

- Anif Istianah, S Mazid, S Hakim, R Susanti. 2021. Integrasi nilai-nilai pancasila untuk membangun karakter pelajar pancasila di lingkungan kampus. *Jurnal Gatranusantara* 19 (1), 62-70. <http://publikasi.undana.ac.id/index.php/JG/article/download/g674/493>.
- Anif Istianah dan Kokom Komalasari, 2023. Membangun Jati Diri Bangsa Dan Karakter Kekindonesiaan Dalam Menghadapi Tantangan Isu Global Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 04 Issue 01 (2023) Pages 96 - 106 *Journal of Social Science and Education* e-ISSN: 2722-9998, P- ISSN: 2723-0007.
- Hariyanti Hariyanti, Irma Irayanti, Gigieh Cahya Permady, Anif Istianah, Saepudin Karta Sasmita, Filma Alia Sari. 2023. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Persekolahan untuk Memperkokoh Rasa Kebangsaan Anak. *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* e-ISSN: 2723-6390, hal. 312-323 Vol. 4, No. 2, Desember 2023 DOI: 10.37985/murhum.v4i2.206.
- Aji, P. C. (2018). Peran PKn dalam membentuk karakter kewarganegaraan melalui pendekatan berbasis nilai di perguruan tinggi. *Prodi PPKn FKIP UNS, Surakarta*.
- Amala Sundari, D. A. D. (2021). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan: Reaktualisasi Kapabilitas Berbangsa Dan Bernegara Pada Siswa Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 523-528.
- Aulia, Syifa Siti, I. A. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Lingkup Sosio-Kultural Pendidikan NonFormal. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1-3.
- Baharudin, Wahyuni, E. (2010). *Teori Belajar Dan Pembelajaran*. Ar Ruzz Media: Yogyakarta.
- Carter, Candice C. (2008). Voluntary Standards for Peace Education, *Journal of Peace Education*, 5 (2), 141-155.
- Eliasa, E. I., et. al. (2019). Pedagogy of peacefulness as an effort of peaceful education at school. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 3(2), 85-96.

- Cogan, John J. (1997), *Multidimensional Citizenship: Educational Policy for the 21st Century, An Executive Summary of the 76 DEMOKRASI* Vol. IV No.1 Th. 2005 Citizenship Education Policy Study Project, Funded by Sasankawa Peace Foundation, Tokyo, Japan. <https://digitalcommons.uno>.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadjam, M.N.R & Widhiarso, W. (2003). *Budaya damai anti kekerasan*. Jakarta: Dirjendikmenum.
- Halim, A. R., & Mislinawati, M. (2019). Upaya guru dalam menerapkan karakter cinta damai pada siswa sekolah dasar negeri 51 Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 4(2).
- Hymel, Shelley, and Lina Darwich. 2018. "Building Peace through Education." *Journal of Peace Education* 15(3):345-57. doi: 10.1080/17400201.2018.1535475.
- Irawan, Hendri, and Krisbaya Bayu Firdaus. 2021. "Resiliensi Pancasila Di Era Disrupsi: Dilematis Media Sosial Dalam Menjawab Tantangan Isu Intoleransi." *Jurnal Paris Langkis* 1(2):36-47.
- Irawan, Hendri, Dwi Hermawan, and Tutik Wijayanti. 2021. "Implementation of the Pendidikan Generasi Muda Dan Kepramukaan (PGMK) for New Students as an Effort to Build the Spirit of State Defense Towards Advanced Indonesia." *Forum Ilmu Sosial* 48(2):114-22. doi: 10.15294/fis.v48i2.32405.
- Irawan, Hendri, and Iim Siti Masyitoh. 2023. "Implementation of Collaborative Learning Model In Realizing Gotong Royong Character As An Effort To Strengthen Profil Pelajar Pancasila At SMP Negeri 1 Belitang Madang Raya." in *Proceedings Of International Conference On Education Teacher Training & Education Faculty Universitas Serambi Mekkah* NO. ISSN 2987-4564.
- Irawan, Hendri, Iim Siti Masyitoh, and Dadang Sundawa. 2023. "Concept And Application of Character Education In The Profil Pelajar Pancasila As An Effort To Strengthen Character In The Era Of Disruption." in *The Third International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICoISSEE)-3*. Bandung.
- Johnson, David W dan Roger T Johnson, (2006). Peace education for consensual peace: The essential role of conflict resolution. *Journal of Peace Education* 3(2), 147-174.
- Kaelan, M.S. Dan Zubaidi, A. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Paradigma: Yogyakarta.
- Mahnan Marbawi, Setiyo Iswoyo Husni Mubarak, A. M. D. S. (2020). Indikator Sekolah Damai Mencipta Generasi Penjaga Kebhinekaan "*Panduan Sekolah Damai, Konsep Dan Indikator*. Wahid Fondation.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 1. 20th ed. edited by T. Iman. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. 38th ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Vol. 1. 9th ed. Bandung: Alfabeta.
- Munthe, B. (2010). *Desain Pembelajaran*. Pustaka Insan Madani: Yogyakarta.
- Murniyetti, M., Engkizar, E., & Anwar, F. (2016). Pola Pelaksanaan Pendidikan Karakter Terhadap Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 6(2).
- Parekh, B. (2017). *Ethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory*. Macmillan Education.
- Putri, Ragil Dian Purnama, N. E. S. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Karakter Kece (Komunikatif, Empatik, Cinta Damai, Energik) Di Sekolah Dasar Dalam Pemanfaatan Bonus Demografi. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fisika* "Motogpe.
- Reichert, Frank, and Murray Print. 2018. "Civic Participation of High School Students: The Effect of Civic Learning in School." *Educational Review* 70(3):318-41. doi: 10.1080/00131911.2017.1316239.
- Russell, Emma K. 2017. "Punishment in a 'Tolerant Society': Interrogating Hate Crime Law Reform Discourse." *Griffith Law Review* 26(3):315-33. doi: 10.1080/10383441.2017.1436372.
- Sofian Abdulatif, D. A. D. (2021). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa. ..." *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (Jpp Guseda)*, 4(2), 103-109.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Vol. 1. 9th ed. Bandung: Alfabeta.
- Suharyanto, A. (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa. *Jppuma : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 1(2), 12.
- Sumaatmadja, N. (1990). *Konsep Dan Eksistensi Pendidikan Umum*. Ikip Bandung.
- Supriyanto, A. (2018). Upaya Untuk Meningkatkan Keberanian Berpendapat Dan Prestasi Belajar Melalui Penerapan Model Dilema Moral Mata Pelajaran Ppkn. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pkn*, 5(2), 116-122.

Sutapa, M. (2006). Membangun komunikasi efektif di sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.

Turk, Fulya. (2018). Evaluation of the Effects of Conflict Resolution, Peace Education and Peer Mediation: A Meta-Analysis Study. *International Education Studies*, 11(1), pp. 26-43.

Walker, Nathan C., W. Y. Alice Chan, and H. Bruce McEver. 2021. "Religious Literacy: Civic Education for a Common Good." *Religion and Education* 48(1):1-16. doi: 10.1080/15507394.2021.1876508.

We'u, G. (2020). Urgensi Pendidikan Multikultural: sebuah Jawaban atas Problematika Pluralitas. *JIPD: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*. 4(2). Hlm. 71-75.

Undang - Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan penjabaran mengenai perlindungan anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan